



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Pakpak Bharat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/TAHUN 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf "a" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Istansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah . Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DAN
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp.	268.888.339.030,00		
2.	Belanja	Rp.	290.031.678.386,00		
	(Defisit)			Rp.	(21.143.339.356,00)
3.	Pembiayaan				
a.	Penerimaan	Rp.	(22.993.339.356,00)		
b.	Pengeluaran	Rp.	1.850.000.000,00		
	Pembiayaan			Rp.	(21.143.339.356,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp.	(0,00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 5.044.710.613,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 248.125.777.941,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 15.717.850.476,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 675.854.113,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1.483.856.500,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 670.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 2.215.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 20.879.661.941,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 198.404.616.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 28.841.500.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "c" terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sejumlah Rp. 3.270.154.876,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 8.166.735.600,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 4.280.960.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 141.081.028.898,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 148.950.649.488,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 118.415.974.898,00
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.574.850.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 13.950.204.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 3.140.000.000,00
 - h. Belanja Tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 6.749.576.264,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 76.404.471.809,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 65.796.601.415,00

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 25 Januari 2011

BUPATI PAKPAK BHARAT,



Remigo Yolando Berutu
REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PAKPAK BHARAT,

Gandi Wartha Manik

GANDI WARTHA MANIK

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 22.993.339.356,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.850.000.000,00
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 22.993.339.356,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 000
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.850.000.000,00
 - c. Pembayaran Pokok utang sejumlah Rp. 0,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Dan Pengurangan Aset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran yang Belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Sebagaimana landasan operasional, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	
		268.888.339.030,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.044.710.613,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	675.854.113,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.483.856.500,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	670.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.215.000.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	248.125.777.941,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.879.661.941,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	198.404.616.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	28.841.500.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.717.850.476,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	3.270.154.876,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.166.735.600,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.280.960.000,00
2	BELANJA	290.031.678.386,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	141.081.028.898,00
2.1.1	Belanja Pegawai	118.415.974.898,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.574.850.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.950.204.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.140.000.000,00
2.1.9	Belanja Tidak Termasuk	

2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	148.950.649.488,00
2.2.1	Belanja Pegawai	6.749.576.264,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.404.471.809,00
2.2.3	Belanja Modal	65.796.601.415,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.143.339.356,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.993.339.356,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.993.339.356,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.850.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.850.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	21.143.339.356,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI



REMIGO YOLANDO BERUTU

KABUPATEN PAKPAK BHARAT RAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2011

	PENDAPATAN	BELANJA			JUMLAH BELANJA
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
	3	4	5	6	
	268.612.961.030,00	130.320.934.744,00	127.244.564.745,00		257.565.499.489,00
	99.600.000,00	51.742.970.341,00	20.806.981.699,00		72.549.952.040,00
	99.600.000,00	51.742.970.341,00	20.806.981.699,00		72.549.952.040,00
	118.150.000,00	14.745.757.280,00	11.504.299.403,00		26.250.056.683,00
	47.000.000,00	10.352.938.956,00	7.288.104.533,00		17.641.043.489,00
	71.150.000,00	4.392.818.324,00	4.216.194.870,00		8.609.013.194,00
	590.000.000,00	3.061.673.823,00	31.406.228.297,00		34.467.902.120,00
	590.000.000,00	3.061.673.823,00	31.406.228.297,00		34.467.902.120,00
	500.000,00	2.150.687.198,00	3.429.394.600,00		5.580.081.798,00
	500.000,00	2.150.687.198,00	3.429.394.600,00		5.580.081.798,00
	0,00	0,00	281.536.231,00		281.536.231,00
	0,00	0,00	281.536.231,00		281.536.231,00
	0,00	0,00	1.155.379.840,00		1.155.379.840,00
	0,00	0,00	158.302.440,00		158.302.440,00
	0,00	0,00	997.077.400,00		997.077.400,00
	0,00	0,00	2.465.543.275,00		2.465.543.275,00
	0,00	0,00	2.465.543.275,00		2.465.543.275,00
	95.000.000,00	1.343.772.246,00	1.278.758.175,00		2.622.530.421,00
	95.000.000,00	1.343.772.246,00	1.278.758.175,00		2.622.530.421,00
	0,00	0,00	137.358.100,00		137.358.100,00
	0,00	0,00	137.358.100,00		137.358.100,00
	0,00	0,00	1.040.896.300,00		1.040.896.300,00
	0,00	0,00	1.040.896.300,00		1.040.896.300,00
	0,00	1.687.870.235,00	1.355.317.090,00		3.043.187.325,00
	0,00	1.687.870.235,00	1.326.291.590,00		3.014.161.825,00
	0,00	0,00	29.025.500,00		29.025.500,00



PEMERINTAH
RINGKASAN APBD MENURUT URUTAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
KODE	
1	2
1	Urusan Wajib
1.01	Pendidikan
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN
1.02	Kesehatan
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK
1.03	Pekerjaan Umum
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.06	Perencanaan Pembangunan
1.06 . 1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.07	Perhubungan
1.07 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMAMAN DAN KEBERSIHAN
1.08	Lingkungan Hidup
1.08 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMAMAN DAN KEBERSIHAN
1.08 . 2.02.01	DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
1.09	Pertanian
1.09 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil
1.10 . 1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.11 . 1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN ANAK
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.12 . 1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN ANAK
1.13	Sosial
1.13 . 1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.13 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1.14	Ketenagakerjaan
1.14 . 1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15 . 2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
1.16	Penanaman Modal
1.16 . 1.16.01	KANTOR PELAYANAN PERJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
1.17	Kebudayaan
1.17 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga
1.18 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1.19 . 1.19.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.19 . 1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peran Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.20 . 1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.20 . 1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.20 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.20 . 1.20.04	SEKRETARIAT DPRD
1.20 . 1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.20 . 1.20.07	INSPEKTORAT KABUPATEN
1.20 . 1.20.08	KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH
1.20 . 1.20.09	KECAMATAN SALAK
1.20 . 1.20.10	KECAMATAN KERAJAN
1.20 . 1.20.11	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE
1.20 . 1.20.12	KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT
1.20 . 1.20.13	KECAMATAN PAGINDAR
1.20 . 1.20.14	KECAMATAN SIEMPAT RUBE
1.20 . 1.20.15	KECAMATAN TINADA
1.20 . 1.20.16	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.22 . 1.20.09	KECAMATAN SALAK
1.22 . 1.20.10	KECAMATAN KERAJAN
1.22 . 1.20.11	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE
1.22 . 1.20.12	KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
3	4	5	6	
	0,00	0,00	47.834.600,00	47.834.600,00
	0,00	0,00	47.834.600,00	47.834.600,00
	0,00	0,00	1.454.651.250,00	1.454.651.250,00
	0,00	0,00	1.454.651.250,00	1.454.651.250,00
MENENGAH				
	58.462.500,00	872.077.907,00	702.561.700,00	1.574.639.607,00
	58.462.500,00	872.077.907,00	702.561.700,00	1.574.639.607,00
	56.336.000,00	1.760.770.133,00	2.697.702.710,00	4.458.472.843,00
	56.336.000,00	1.760.770.133,00	2.697.702.710,00	4.458.472.843,00
	0,00	0,00	364.227.900,00	364.227.900,00
	0,00	0,00	364.227.900,00	364.227.900,00
	0,00	2.130.719.096,00	2.059.837.624,00	4.190.556.720,00
	0,00	966.021.458,00	622.634.564,00	1.588.656.022,00
	0,00	1.164.697.638,00	1.062.508.000,00	2.227.205.638,00
	0,00	0,00	374.695.060,00	374.695.060,00
ngkat				
	267.594.912.530,00	49.074.425.327,00	38.831.466.351,00	87.905.691.678,00
	0,00	2.496.859.144,00	0,00	2.496.859.144,00
	0,00	287.467.506,00	0,00	287.467.506,00
	348.230.000,00	7.016.057.106,00	23.433.696.332,00	30.449.753.438,00
	0,00	1.742.199.494,00	4.506.080.050,00	6.248.279.544,00
	267.246.682.530,00	25.295.617.162,00	3.248.870.039,00	28.544.487.201,00
	0,00	1.798.500.657,00	1.266.021.100,00	3.064.521.757,00
	0,00	1.628.932.579,00	2.583.169.500,00	4.212.102.079,00
	0,00	1.296.873.536,00	527.090.175,00	1.823.963.711,00
	0,00	1.366.832.690,00	505.535.875,00	1.872.368.565,00
	0,00	1.128.074.322,00	447.930.175,00	1.576.004.497,00
	0,00	1.099.541.758,00	468.060.200,00	1.567.601.958,00
	0,00	919.835.694,00	542.968.475,00	1.462.804.169,00
	0,00	912.014.665,00	510.798.400,00	1.422.813.065,00
	0,00	1.111.695.930,00	369.184.230,00	1.480.880.160,00
	0,00	973.923.084,00	422.061.800,00	1.395.984.884,00
	0,00	1.750.211.158,00	4.933.767.500,00	6.683.978.658,00
	0,00	0,00	27.368.800,00	27.368.800,00
	0,00	0,00	35.931.100,00	35.931.100,00
	0,00	0,00	24.634.300,00	24.634.300,00
	0,00	0,00	7.627.400,00	7.627.400,00

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
KB	0,00	0,00	32.162.900,00	32.162.900,00
	0,00	0,00	26.039.300,00	26.039.300,00
	0,00	0,00	18.724.600,00	18.724.600,00
	0,00	1.750.211.158,00	4.761.279.100,00	6.511.490.258,00
	0,00	0,00	89.533.100,00	89.533.100,00
	0,00	0,00	89.533.100,00	89.533.100,00
	0,00	0,00	1.201.289.000,00	1.201.289.000,00
	0,00	0,00	1.201.289.000,00	1.201.289.000,00
	275.378.000,00	10.760.094.154,00	21.706.084.743,00	32.466.178.897,00
	192.218.000,00	6.037.125.649,00	12.624.854.553,00	18.661.980.202,00
THAN	192.218.000,00	2.720.650.900,00	9.639.129.153,00	12.359.780.053,00
	0,00	3.316.474.749,00	2.985.725.400,00	6.302.200.149,00
	7.800.000,00	2.398.803.688,00	1.894.054.800,00	4.292.858.488,00
	7.800.000,00	2.398.803.688,00	1.894.054.800,00	4.292.858.488,00
	0,00	0,00	2.215.138.200,00	2.215.138.200,00
	0,00	0,00	2.215.138.200,00	2.215.138.200,00
	0,00	0,00	220.679.190,00	220.679.190,00
	0,00	0,00	220.679.190,00	220.679.190,00
	0,00	0,00	1.560.533.700,00	1.560.533.700,00
	0,00	0,00	1.560.533.700,00	1.560.533.700,00
DAN MENENGAH	0,00	0,00	1.643.456.300,00	1.643.456.300,00
	75.360.000,00	2.324.164.817,00	1.381.765.700,00	3.705.930.517,00
	75.360.000,00	2.324.164.817,00	1.381.765.700,00	3.705.930.517,00
	0,00	0,00	165.602.300,00	165.602.300,00
	0,00	0,00	165.602.300,00	165.602.300,00
	268.888.339.030,00	141.081.028.898,00	148.950.649.488,00	290.031.678.386,00
			(21.143.339.356,00)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1.22 . 1.20.14	KECAMATAN SIEMPAT RUBE
1.22 . 1.20.15	KECAMATAN TINADA
1.22 . 1.20.16	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU
1.22 . 1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN
1.24	Kearsipan
1.24 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1.25	Komunikasi dan Informatika
1.25 . 1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
2	Urusan Pilihan
2.01	Pertanian
2.01 . 2.01.01	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.01 . 2.01.02	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2.02	Kehutanan
2.02 . 2.02.01	DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral
2.03 . 2.02.01	DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN
2.04	Pariwisata
2.04 . 1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
2.05	Kelautan dan Perikanan
2.05 . 2.01.01	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.06	Perdagangan
2.06 . 2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN SEDERHANA
2.07	Industri
2.07 . 2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN SEDERHANA
2.08	Ketransmigrasian
2.08 . 1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	JUMLAH
	SURPLUS / (DEFISIT)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
KODE	
1	2
1	Urusan Wajib
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perat
1.20 . 1.20.05	Daerah, Kepegawaian dan Persandian DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAH	

	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
	3	4	5	6
	22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
	22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
ngkat	22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
UN ANGGARAN BERKENAAN				0,00

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI

REMIGO YOLANDO BERUTU



Lampiran IIa Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
T ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2011

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
	99.600.000,00	51.742.970.341,00	20.806.981.699,00	72.549.952.040,00
	99.600.000,00	51.742.970.341,00	20.806.981.699,00	72.549.952.040,00
	47.000.000,00	10.352.938.956,00	7.288.104.533,00	17.641.043.489,00
	47.000.000,00	10.352.938.956,00	7.288.104.533,00	17.641.043.489,00
	71.150.000,00	4.392.818.324,00	4.216.194.870,00	8.609.013.194,00
	71.150.000,00	4.392.818.324,00	4.216.194.870,00	8.609.013.194,00
	590.000.000,00	3.061.673.823,00	31.406.228.297,00	34.467.902.120,00
	590.000.000,00	3.061.673.823,00	31.406.228.297,00	34.467.902.120,00
	500.000,00	2.150.687.198,00	3.429.394.600,00	5.580.081.798,00
	500.000,00	2.150.687.198,00	3.429.394.600,00	5.580.081.798,00
	95.000.000,00	1.343.772.246,00	1.278.758.175,00	2.622.530.421,00
	95.000.000,00	1.343.772.246,00	1.278.758.175,00	2.622.530.421,00
	0,00	1.687.870.235,00	1.539.728.490,00	3.227.598.725,00
	0,00	1.687.870.235,00	1.326.291.590,00	3.014.161.825,00
	0,00	0,00	47.834.600,00	47.834.600,00
	0,00	0,00	165.602.300,00	165.602.300,00
	58.462.500,00	872.077.907,00	702.561.700,00	1.574.639.607,00
	58.462.500,00	872.077.907,00	702.561.700,00	1.574.639.607,00
	56.336.000,00	1.760.770.133,00	3.358.220.571,00	5.118.990.704,00
	0,00	0,00	281.536.231,00	281.536.231,00
	0,00	0,00	158.302.440,00	158.302.440,00
	56.336.000,00	1.760.770.133,00	2.697.702.710,00	4.458.472.843,00
	0,00	0,00	220.679.190,00	220.679.190,00
	0,00	966.021.458,00	622.634.564,00	1.588.656.022,00

ERSTIHAN



PEMERINTAHAN
RINGKASAN APBD MENURUT

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1		2
1.01.01	1.01	DINAS PENDIDIKAN Urusan Wajib Pendidikan
1.02.01	1.02	DINAS KESEHATAN Urusan Wajib Kesehatan
1.02.02		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK Urusan Wajib Kesehatan
1.03.01	1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM Urusan Wajib Pekerjaan Umum
1.06.01	1.06	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
1.10.01	1.10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
1.13.01		DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Urusan Wajib Sosial Urusan Wajib Ketenagakerjaan Urusan Pilihan Ketransmigrasian
1.16.01	1.16	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL Urusan Wajib Penanaman Modal
1.17.01	1.07 1.08 1.17 2.04	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN KEBUDAYAAN Urusan Wajib Perhubungan Urusan Wajib Lingkungan Hidup Urusan Wajib Kebudayaan Urusan Pilihan Pariwisata
1.19.01		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
1		2	
1.19.02	1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.20.01	1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
1.20.02	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	
		KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	
1.20.03	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	
		SEKRETARIAT DAERAH	
	1.09	Urusan Wajib Pertanahan	
	1.13	Urusan Wajib Sosial	
	1.18	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga	
	1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	
	1.24	Urusan Wajib Kearsipan	
	1.25	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	
1.20.04		SEKRETARIAT DPRD	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	
1.20.05		DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	
1.20.07		INSPEKTORAT KABUPATEN	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	
1.20.08		KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	
1.20.09		KECAMATAN SALAK	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	
	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1.20.10		KECAMATAN KERAJAAN	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	
	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1.20.11		KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per	

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
	0,00	966.021.458,00	622.634.564,00	1.588.656.022,00
	0,00	1.164.697.638,00	1.062.508.000,00	2.227.205.638,00
	0,00	1.164.697.638,00	1.062.508.000,00	2.227.205.638,00
	0,00	2.496.859.144,00	0,00	2.496.859.144,00
	0,00	2.496.859.144,00	0,00	2.496.859.144,00
	0,00	287.467.506,00	0,00	287.467.506,00
	0,00	287.467.506,00	0,00	287.467.506,00
	348.230.000,00	7.016.057.106,00	27.958.010.167,00	34.974.067.273,00
	0,00	0,00	2.465.543.275,00	2.465.543.275,00
	0,00	0,00	29.025.500,00	29.025.500,00
	0,00	0,00	364.227.900,00	364.227.900,00
	0,00	0,00	374.695.060,00	374.695.060,00
	348.230.000,00	7.016.057.106,00	23.433.696.332,00	30.449.753.438,00
	0,00	0,00	89.533.100,00	89.533.100,00
	0,00	0,00	1.201.289.000,00	1.201.289.000,00
	0,00	1.742.199.494,00	4.506.080.050,00	6.248.279.544,00
	0,00	1.742.199.494,00	4.506.080.050,00	6.248.279.544,00
	267.246.682.530,00	25.295.617.162,00	3.248.870.039,00	28.544.487.201,00
	267.246.682.530,00	25.295.617.162,00	3.248.870.039,00	28.544.487.201,00
	0,00	1.798.500.657,00	1.266.021.100,00	3.064.521.757,00
	0,00	1.798.500.657,00	1.266.021.100,00	3.064.521.757,00
	0,00	1.628.932.579,00	2.583.169.500,00	4.212.102.079,00
	0,00	1.628.932.579,00	2.583.169.500,00	4.212.102.079,00
	0,00	1.296.873.536,00	554.458.975,00	1.851.332.511,00
	0,00	1.296.873.536,00	527.090.175,00	1.823.963.711,00
	0,00	0,00	27.368.800,00	27.368.800,00
	0,00	1.366.832.690,00	541.466.975,00	1.908.299.665,00
	0,00	1.366.832.690,00	505.535.875,00	1.872.368.565,00
	0,00	0,00	35.931.100,00	35.931.100,00
	0,00	1.128.074.322,00	472.564.475,00	1.600.638.797,00
	0,00	1.128.074.322,00	447.930.175,00	1.576.004.497,00

	PENDAPATAN	BELANJA		
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
	3	4	5	6
Perangkat	0,00	0,00	24.634.300,00	24.634.300,00
	0,00	1.099.541.758,00	475.687.600,00	1.575.229.358,00
	0,00	1.099.541.758,00	468.060.200,00	1.567.601.958,00
	0,00	0,00	7.627.400,00	7.627.400,00
Perangkat	0,00	919.835.694,00	542.968.475,00	1.462.804.169,00
	0,00	919.835.694,00	542.968.475,00	1.462.804.169,00
	0,00	912.014.665,00	542.961.300,00	1.454.975.965,00
	0,00	912.014.665,00	510.798.400,00	1.422.813.065,00
Perangkat	0,00	0,00	32.162.900,00	32.162.900,00
	0,00	1.111.695.930,00	395.223.530,00	1.506.919.460,00
	0,00	1.111.695.930,00	369.184.230,00	1.480.880.160,00
	0,00	0,00	26.039.300,00	26.039.300,00
Perangkat	0,00	973.923.084,00	440.786.400,00	1.414.709.484,00
	0,00	973.923.084,00	422.061.800,00	1.395.984.884,00
	0,00	0,00	18.724.600,00	18.724.600,00
	0,00	1.750.211.158,00	5.939.533.500,00	7.689.744.658,00
DAN KB	0,00	0,00	137.358.100,00	137.358.100,00
	0,00	0,00	1.040.896.300,00	1.040.896.300,00
	0,00	1.750.211.158,00	4.761.279.100,00	6.511.490.258,00
	192.218.000,00	2.720.650.900,00	11.199.662.853,00	13.920.313.753,00
N	192.218.000,00	2.720.650.900,00	9.639.129.153,00	12.359.780.053,00
	0,00	0,00	1.560.533.700,00	1.560.533.700,00
	0,00	3.316.474.749,00	2.985.725.400,00	6.302.200.149,00
	0,00	3.316.474.749,00	2.985.725.400,00	6.302.200.149,00
CIL DAN	7.800.000,00	2.398.803.688,00	5.106.270.400,00	7.505.074.088,00
	0,00	0,00	997.077.400,00	997.077.400,00
	7.800.000,00	2.398.803.688,00	1.894.054.800,00	4.292.858.488,00
	0,00	0,00	2.215.138.200,00	2.215.138.200,00
	75.360.000,00	2.324.164.817,00	4.479.873.250,00	6.804.038.067,00
	0,00	0,00	1.454.651.250,00	1.454.651.250,00
	0,00	0,00	1.643.456.300,00	1.643.456.300,00

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
1	2		
1.20.12	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		KECAMATAN PARGETTENG-GETTENG SENGKUT	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, P	
	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1.20.13		KECAMATAN PAGINDAR	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, P	
1.20.14		KECAMATAN SIEMPAT RUBE	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, P	
	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1.20.15		KECAMATAN TINADA	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, P	
	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1.20.16		KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU	
	1.20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, P	
	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1.22.01		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN D	
	1.11	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	1.12	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
	1.22	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2.01.01		DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	
	2.01	Urusan Pilihan Pertanian	
	2.05	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	
2.01.02		BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	
	2.01	Urusan Pilihan Pertanian	
2.02.01		DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN	
	1.08	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	
	2.02	Urusan Pilihan Kehutanan	
	2.03	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
2.07.01		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KE	
		MENENGAH	
	1.15	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2.06	Urusan Pilihan Perdagangan	

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2	
2.07	Urusan Pilihan Industri	
JUMLAH		
SURPLUS / (DEFISIT)		
KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
1	2	
1.20.05	1.20	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Per
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN		

PENDAPATAN	BELANJA		
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
3	4	5	6
75.360.000,00	2.324.164.817,00	1.381.765.700,00	3.705.930.517,00
268.888.339.030,00	141.081.028.898,00	148.950.649.488,00	290.031.678.386,00
(21.143.339.356,00)			
PEMBIAYAAN			SILPA TAB
PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
3	4	5	6
22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
22.993.339.356,00	1.850.000.000,00	21.143.339.356,00	
angkat			
JUN ANGGARAN BERKENAAN			0,00

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI



REMIGO YOLANDO BERUTU



**KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 USAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 N, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	99.600.000,00	Perda No. 16 Tahun 2006
	99.600.000,00	
	99.600.000,00	
	72.549.952.040,00	
	51.742.970.341,00	PMK 223/PMK. 07/2009
	51.742.970.341,00	
	20.806.981.699,00	
	2.652.880.476,00	
	31.635.000,00	
	31.635.000,00	
	88.560.000,00	
	88.560.000,00	
	126.472.940,00	
	126.472.940,00	
	84.828.400,00	
	84.828.400,00	
	711.115.055,00	
	711.115.055,00	
	173.568.600,00	
	173.568.600,00	
gunan kantor	51.350.081,00	
	51.350.081,00	
ndangan	77.760.000,00	



**PEMERINTAH
RINCIAN APBD MENURUT UR
PENDAPATAN**

Urusan Pemerintahan : 1.01 Organisasi : 1.01.01 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01		Urusan Wajib Pendidikan DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
KODE REKENING	URAIAN	
1	2	
1.01.1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	
1.01.1.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.01.1.01.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.01.1.01.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.01.1.01.01.01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.01.1.01.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.01.1.01.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan pengandaan</i>	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.01.1.01.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan</i>	
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.01.1.01.01.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis per</i>
1.01.1.01.01.01.22.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.01.1.01.01.01.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.01.1.01.01.01.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.02.07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>
1.01.1.01.01.02.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3	Belanja Modal
1.01.1.01.01.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.01.1.01.01.02.22.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>
1.01.1.01.01.02.26	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.1.01.01.05.06	<i>Pelatihan SDM</i>
1.01.1.01.01.05.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.1.01.01.15.58	<i>Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini</i>
1.01.1.01.01.15.58.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Ta
1.01.1.01.01.16.01	<i>Pembangunan gedung sekolah</i>
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1	Belanja Pegawai

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
Kantoran	77.760.000,00	
	626.847.500,00	
	626.847.500,00	
	198.628.000,00	
	67.828.000,00	
	130.800.000,00	
	453.330.000,00	
	453.330.000,00	
	28.784.900,00	
	28.784.900,00	
ur	373.730.900,00	
	26.998.100,00	
	1.737.500,00	
	25.260.600,00	
	34.151.300,00	
	1.250.000,00	
	32.901.300,00	
	283.250.000,00	
	283.250.000,00	
	13.731.500,00	
hun	13.731.500,00	
	15.600.000,00	
	15.600.000,00	
	40.000.000,00	
	40.000.000,00	
	40.000.000,00	
	903.989.000,00	
	903.989.000,00	
	1.325.000,00	
	902.664.000,00	
	15.270.675.400,00	
	515.483.000,00	
	40.130.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	4.953.000,00	
	470.400.000,00	
	28.079.000,00	
	5.600.000,00	
	22.479.000,00	
	19.169.250,00	
	4.200.000,00	
	14.969.250,00	
	90.473.250,00	
	1.694.000,00	
	88.779.250,00	
	61.435.300,00	
	31.810.000,00	
	29.625.300,00	
	28.057.200,00	
	3.500.000,00	
	24.557.200,00	
	32.534.800,00	
	4.365.000,00	
	28.169.800,00	
	10.393.090.600,00	
	7.550.000,00	
	233.200.600,00	
	10.152.340.000,00	
	4.102.353.000,00	
	4.102.353.000,00	
	1.003.296.773,00	
	14.000.000,00	
	14.000.000,00	
	505.000.000,00	
	3.650.000,00	
	1.350.000,00	
	500.000.000,00	
	4.376.083,00	

an (UNPK) Paket A, B dan C

kan

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Pelaksanaan UASBN SD/MI</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Pelaksanaan ujian SMP/MTs</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Penelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Penggunaan dana BOS SD/SDLB dan SMP Negeri</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17	Belanja Barang dan Jasa Program Pendidikan Menengah
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14	<i>Pembangunan sarana air bersih dan sanitary</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18	Belanja Modal <i>Pengadaan alat praktik dan peraga siswa</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 20	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Pengadaan perlengkapan sekolah</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By Sindo

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.01.1.01.01.17.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.23	<i>Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah</i>
1.01.1.01.01.17.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.66	<i>Peningkatan Kertasama dengan dunia usaha dan dunia indut</i>
1.01.1.01.01.17.66.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.82	<i>Olimpiade Sains Tk. SMA</i>
1.01.1.01.01.17.82.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.86	<i>Ujian Akhir Sekolah Tk. SMA</i>
1.01.1.01.01.17.86.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.86.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.87	<i>Ujian Akhir Sekolah Tk. SMK</i>
1.01.1.01.01.17.87.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.87.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.90	<i>Fasilitasi ujian nasional</i>
1.01.1.01.01.17.90.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.90.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.91	<i>Kertasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk</i>
1.01.1.01.01.17.91.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.91.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.95	<i>Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul belajar</i>
1.01.1.01.01.17.95.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.95.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.96	<i>Pengadaan buku adat dan budaya Pakpak SMP dan SMA</i>
1.01.1.01.01.17.96.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.17.96.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.17.96.5.2.3	Belanja Modal
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.18.14	<i>Kegiatan HAI</i>
1.01.1.01.01.18.14.5.2.1	Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.15	<i>Peringatan Hari Pendidikan Nasional</i>
1.01.1.01.01.18.15.5.2.1	Belanja Pegawai

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	4.376.083,00	
	52.228.790,00	
	52.228.790,00	
	80.585.000,00	
	2.700.000,00	
	77.885.000,00	
	31.202.400,00	
	1.400.000,00	
	29.802.400,00	
	29.974.400,00	
	14.850.000,00	
	15.124.400,00	
	15.460.200,00	
	7.270.000,00	
	8.190.200,00	
	117.667.000,00	
	1.400.000,00	
	116.267.000,00	
	17.812.900,00	
	1.400.000,00	
	16.412.900,00	
	9.990.000,00	
	7.260.000,00	
	2.730.000,00	
	125.000.000,00	
	1.700.000,00	
	3.300.000,00	
	120.000.000,00	
	387.163.850,00	
	54.321.550,00	
	1.325.000,00	
	52.996.550,00	
	42.990.400,00	
	1.925.000,00	

ke PTN

ajaran pendidikan Smk (KTSP)

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	41.065.400,00	
	39.976.900,00	
	2.525.000,00	
	37.451.900,00	
	130.045.000,00	
	67.200.000,00	
	3.717.000,00	
	59.128.000,00	
	36.350.000,00	
	12.605.000,00	
	23.745.000,00	
	47.290.500,00	
	12.465.000,00	
	34.825.500,00	
	36.189.500,00	
	3.200.000,00	
	2.261.400,00	
	30.728.100,00	
	175.245.300,00	
	42.973.400,00	
	10.025.000,00	
	32.948.400,00	
	132.271.900,00	
	54.125.000,00	
	78.146.900,00	
	(72.450.352.040,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)		

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI



REMIGO YOLANDO BERUTU

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	<i>Jambore PTK PNF</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21	<i>Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	<i>Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23	<i>Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27	<i>Pembangunan sarana listrik</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22	<i>Sosialisasi Sertifikasi Pendidik</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35	<i>Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya paksi</i>
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

Lampiran III Peraturan Daerah

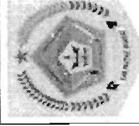
Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT
USAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
N, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	47.000.000,00	Perda No. 15 Tahun 2007
	47.000.000,00	
	47.000.000,00	
	17.641.043.489,00	
	10.352.938.956,00	
	10.352.938.956,00	
	7.288.104.533,00	
	1.438.887.200,00	
	43.431.100,00	
	43.431.100,00	
	391.600.000,00	
	231.600.000,00	
	160.000.000,00	
	26.000.000,00	
	26.000.000,00	
	77.735.000,00	
	77.735.000,00	
	144.186.100,00	
	1.350.000,00	
	275.800,00	
	112.560.300,00	
	184.010.000,00	
	184.010.000,00	
	74.400.000,00	
Perkantoran		



PEMERINTAH
RINCIAN APBD MENURUT UR
PENDAPATAN

Urusan Pemerintahan : 1.02	Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01	DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01	DINAS KESEHATAN
KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah
1.02.1.02.01.00.00.5	BELANJA
1.02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.1.02.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.02.1.02.01.01.02	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Modal
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.02.1.02.01.01.09	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.09.5.2.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02.1.02.01.01.11	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02.1.02.01.01.13	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.01.13.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.13.5.2.2	Belanja Modal
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3	Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.01.01.17	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis
1.02.1.02.01.01.22	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02.1.02.01.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.02.1.02.01.01.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.02.1.02.01.02.22.5.2.3	Belanja Modal
1.02.1.02.01.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.02.1.02.01.03.05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>
1.02.1.02.01.03.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.03.08	<i>Evaluasi jabatan fungsional</i>
1.02.1.02.01.03.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.01.05.01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01	<i>Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan</i>
1.02.1.02.01.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.15.02	<i>Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan</i>
1.02.1.02.01.15.07	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16	<i>Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana</i>
1.02.1.02.01.16.03	<i>jangkanya</i>
1.02.1.02.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.03.5.2.3	Belanja Modal
1.02.1.02.01.16.12	<i>Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan</i>
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa

Jumlah	3	DASAR HUKUM	4
	74.400.000,00		
	497.525.000,00		
	497.525.000,00		
	817.020.000,00		
	156.500.000,00		
	156.500.000,00		
	660.520.000,00		
	660.520.000,00		
	49.091.800,00		
	35.000.000,00		
	35.000.000,00		
	14.091.800,00		
	14.091.800,00		
	185.000.000,00		
	185.000.000,00		
	932.330.100,00		
	111.604.600,00		
	1.350.000,00		
	110.254.600,00		
	46.159.300,00		
	850.000,00		
	45.309.300,00		
	774.566.200,00		
	1.350.000,00		
	773.216.200,00		
	1.952.597.200,00		
	1.552.756.300,00		
	5.550.000,00		
	124.466.300,00		
	1.422.740.000,00		
	342.823.000,00		
	229.823.000,00		

ana puskesmas dan

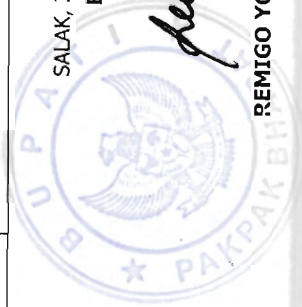
	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
syarakat	113.000.000,00	
	23.040.000,00	
	23.040.000,00	
	33.977.900,00	
	8.275.000,00	
	25.702.900,00	
	261.135.900,00	
	243.484.500,00	
	3.600.000,00	
	239.884.500,00	
t Menular	17.651.400,00	
	8.800.000,00	
	8.851.400,00	
	53.318.300,00	
	22.681.100,00	
	22.681.100,00	
	20.441.800,00	
	7.000.000,00	
	13.441.800,00	
	10.195.400,00	
an wabah	10.195.400,00	
	524.998.883,00	
	13.892.800,00	
	13.642.800,00	
	250.000,00	
	49.809.833,00	
	49.809.833,00	
	48.764.600,00	
	48.764.600,00	
	104.394.900,00	
	104.394.900,00	
	20.434.200,00	
	20.434.200,00	
	66.553.400,00	

KODE REKENING		URAIAN
1	2	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat <i>Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Penyuluhan PHBS bagi anak Sekolah</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Perbaikan Gizi Masyarakat <i>Pemberian tambahan makanan dan vitamin</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Pendistribusian makanan tambahan</i> Belanja Barang dan Jasa Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit <i>Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Pengadaan vaksin penyakit menular</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan imunisasi</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru</i>
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1		
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 19		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit <i>Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Pengadaan vaksin penyakit menular</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan imunisasi</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 20		
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02		
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08		
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1		
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09		
1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit <i>Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Pengadaan vaksin penyakit menular</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan imunisasi</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru</i>
1.02 . 1.02.01 . 22		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit <i>Penyemprotan/fogging sarang nyamuk</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Pengadaan vaksin penyakit menular</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan imunisasi</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru</i>
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2		
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23		

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.25	<i>Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di sekolah</i>
1.02.1.02.01.22.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.26	<i>Pemeriksaan golongan darah</i>
1.02.1.02.01.22.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.27	<i>Pertemuan pembalasan penyakit degeneratif dan fasilitas</i>
1.02.1.02.01.22.27.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.22.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.28	<i>Pemeriksaan osteoporosis</i>
1.02.1.02.01.22.28.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.22.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.06	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>
1.02.1.02.01.23.06.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.23.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.08	<i>Rapat kerja kesehatan daerah</i>
1.02.1.02.01.23.08.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.23.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1.02.1.02.01.24.01	<i>Pelayanan operasi katarak</i>
1.02.1.02.01.24.01.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.24.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.24.01.5.2.3	Belanja Modal
1.02.1.02.01.24.04	<i>Pelayanan sunatan masal</i>
1.02.1.02.01.24.04.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.24.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.24.12	<i>Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah</i>
1.02.1.02.01.24.12.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.24.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.24.13	<i>Sosialisasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan</i>
1.02.1.02.01.24.13.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.24.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02.1.02.01.30.01	<i>Pelayanan pemeliharaan kesehatan</i>

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
laboratorium puskesmas	66.553.400,00	
	126.912.450,00	
	126.912.450,00	
	29.650.000,00	
	29.650.000,00	
	44.199.200,00	
	3.600.000,00	
	40.599.200,00	
	20.387.500,00	
	5.600.000,00	
	14.787.500,00	
	34.269.200,00	
	5.961.800,00	
	1.260.000,00	
	4.701.800,00	
	28.307.400,00	
	8.725.000,00	
	19.582.400,00	
	895.656.900,00	
	88.729.000,00	
	16.200.000,00	
	68.663.600,00	
	3.865.400,00	
	35.514.200,00	
	15.900.000,00	
	19.611.200,00	
	761.226.100,00	
	3.248.000,00	
	757.978.100,00	
	10.187.600,00	
	3.600.000,00	
	6.587.600,00	
	49.433.780,00	
	49.433.780,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
Salak	2.150.000,00	
	47.283.780,00	
	94.365.270,00	
	12.527.600,00	
	6.400.000,00	
	6.127.600,00	
	74.380.470,00	
	22.400.000,00	
	40.561.100,00	
	11.419.370,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	7.457.200,00	
	7.457.200,00	
	(17.594.043.489,00)	



SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI

[Signature]

REMIGO YOLANDO BERUTU

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05	<i>Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12	<i>Pelatihan penanganan asfiksia</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13	<i>Evaluasi manajemen buku KIA/PWS KIA</i>
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KEPESANTHAN DAERAH, ORGANISASI,
PEKERJAAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	71.150.000,00	Perda No. 15 Tahun 2007
	71.150.000,00	
	71.150.000,00	
	8.609.013.194,00	
	4.392.818.324,00	
	4.392.818.324,00	
	4.216.194.870,00	
	1.684.320.670,00	
	1.140.000,00	
	1.140.000,00	
	75.125.000,00	
	75.125.000,00	
	98.080.200,00	
	98.080.200,00	
	22.180.400,00	
	22.180.400,00	
	109.739.700,00	
	2.300.000,00	
	107.439.700,00	
	43.215.750,00	
	43.215.750,00	
	44.696.800,00	
	44.696.800,00	
	14.250.000,00	

gunan Kantor



PEMERINTAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PENDAPATAN

Urusan Pemerintahan : 1.02 Organisasi : 1.02.02 Sub Unit Organisasi : 1.02.02.01		Urusan Wajib Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK
KODE REKENING	URAIAN	
1	2	
1.02.1.02.02.00.00.4	PENDAPATAN	
1.02.1.02.02.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	
1.02.1.02.02.00.00.5	BELANJA	
1.02.1.02.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	
1.02.1.02.02.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.02.1.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	
1.02.1.02.02.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.02.1.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
1.02.1.02.02.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.02.1.02.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	
1.02.1.02.02.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.02.1.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.02.1.02.02.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.02.1.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	
1.02.1.02.02.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.02.1.02.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3	Belanja Modal	
1.02.1.02.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN		

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02.1.02.02.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.02.1.02.02.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.01.22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkotaan</i>
1.02.1.02.02.01.22.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.01.26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.02.1.02.02.01.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.01.27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.02.1.02.02.01.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.02.02.07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>
1.02.1.02.02.02.07.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.02.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.02.07.5.2.3	Belanja Modal
1.02.1.02.02.02.10	<i>Pengadaan mebelur</i>
1.02.1.02.02.02.10.5.2.1	Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.02.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3	Belanja Modal
1.02.1.02.02.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.02.1.02.02.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.02.30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>
1.02.1.02.02.02.30.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.02.1.02.02.03.05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>
1.02.1.02.02.03.05	Belanja Pegawai
1.02.1.02.02.03.05.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.03.05.5.2.2	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.02.1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.02.05.01	<i>Pendidikan dan pelatihan informal</i>
1.02.1.02.02.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	14.250.000,00	
	191.995.000,00	
	191.995.000,00	
	788.350.000,00	
	2.300.000,00	
	786.050.000,00	
	293.575.000,00	
	293.575.000,00	
	1.972.820,00	
	1.972.820,00	
	933.787.800,00	
	305.147.700,00	
	2.300.000,00	
	21.600.000,00	
	281.247.700,00	
	299.132.600,00	
	2.300.000,00	
	171.364.000,00	
	125.468.600,00	
	200.000.000,00	
	200.000.000,00	
	120.007.500,00	
	120.007.500,00	
	9.500.000,00	
	9.500.000,00	
	97.370.000,00	
	97.370.000,00	
	1.650.000,00	
	95.720.000,00	
	243.000.000,00	
	243.000.000,00	
	243.000.000,00	
	25.000.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	25.000.000,00	
	25.000.000,00	
	191.086.400,00	
	59.821.200,00	
	8.400.000,00	
	51.421.200,00	
	26.705.200,00	
	13.100.700,00	
	13.604.500,00	
	104.560.000,00	
	104.560.000,00	
rumah sakit/ rumah	886.350.000,00	
	886.350.000,00	
	4.850.000,00	
	881.500.000,00	
rumah sakit jiwa/	155.280.000,00	
	133.000.000,00	
	133.000.000,00	
	22.280.000,00	
	20.000.000,00	
	2.280.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(8.537.863.194,00)	


 SALAK, 25 Januari 2011
 BUPATI

 REMIGO YOLANDO BERUTU

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.02 . 1.02.02 . 16 . 15	<i>Penyediaan jasa pelayanan kesehatan</i>
1.02 . 1.02.02 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 23 . 11	<i>Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit</i>
1.02 . 1.02.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 23 . 12	<i>Peningkatan pelayanan unit transfusi darah rumah sakit</i>
1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 23 . 13	<i>Penyediaan perijinan sarana dan prasarana kesehatan</i>
1.02 . 1.02.02 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19	<i>Pengadaan obat-obatan rumah sakit</i>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17	<i>Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit</i>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22	<i>Kalibrasi alat-alat kesehatan</i>
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

Lampiran III Peraturan Daerah

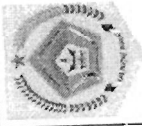
Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
MANAJEMEN, DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN 2011

		JUMLAH	DASAR HUKUM
		3	4
		590.000.000,00	Perda No. 16 Tahun 2006 Perbup No. 7 Tahun 2008
		590.000.000,00	
		440.000.000,00	
		150.000.000,00	
		34.467.902.120,00	
		3.061.673.823,00	
		3.061.673.823,00	
		31.406.228.297,00	
		1.039.992.597,00	
		101.445.600,00	
		1.450.000,00	
		99.995.600,00	
		47.306.000,00	
		1.050.000,00	
Jumlah		46.256.000,00	
		42.999.100,00	
		1.050.000,00	
		11.583.100,00	
		30.366.000,00	
		12.884.000,00	
		1.450.000,00	
Jumlah		11.434.000,00	
		6.150.000,00	
		1.050.000,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PENDAPATAN, BELANJA**
TAHUN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.03
Organisasi : 1.03.01
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01

Urusan Wajib Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.03.1.03.01.00.00.4 1.03.1.03.01.00.00.4.1 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2 1.03.1.03.01.00.00.4.1.4 1.03.1.03.01.00.00.5 1.03.1.03.01.00.00.5.1 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 1.03.1.03.01.01.01.5.2.1 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 1.03.1.03.01.01.02 1.03.1.03.01.01.02.5.2.1 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 1.03.1.03.01.01.03 1.03.1.03.01.01.03.5.2.1 1.03.1.03.01.01.03.5.2.2 1.03.1.03.01.01.03.5.2.3 1.03.1.03.01.01.12 1.03.1.03.01.01.12.5.2.1 1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 1.03.1.03.01.01.15 1.03.1.03.01.01.15.5.2.1	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan jasa surat menyurat</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Penyediaan hahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i> Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING		URAIAN
1	2	
1.03.1.03.01.01.15.5.2.3	Belanja Modal	
1.03.1.03.01.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	
1.03.1.03.01.01.17.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.01.22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis per</i>	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.03.1.03.01.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.01.26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>	
1.03.1.03.01.01.26.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.03.1.03.01.01.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.01.27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>	
1.03.1.03.01.01.27.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.03.1.03.01.01.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1.03.1.03.01.02.03	<i>Pembangunan gedung kantor (DAU)</i>	
1.03.1.03.01.02.03.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.03.1.03.01.02.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.02.03.5.2.3	Belanja Modal	
1.03.1.03.01.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3	Belanja Modal	
1.03.1.03.01.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.03.1.03.01.05.01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	
1.03.1.03.01.15.05	<i>Pembangunan jembatan</i>	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3	Belanja Modal	
1.03.1.03.01.15.08	<i>Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)</i>	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PENGAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	5.100.000,00	
	65.419.000,00	
	1.450.000,00	
	63.969.000,00	
	430.400.000,00	
	800.000,00	
	429.600.000,00	
	326.565.000,00	
	1.200.000,00	
	325.365.000,00	
	6.823.897,00	
	800.000,00	
	6.023.897,00	
	7.868.295.800,00	
	7.243.506.600,00	
	20.300.000,00	
	229.306.600,00	
	6.593.900.000,00	
	494.139.200,00	
	6.500.000,00	
	13.639.200,00	
	474.000.000,00	
	130.650.000,00	
	1.050.000,00	
	129.600.000,00	
	186.415.000,00	
	186.415.000,00	
	800.000,00	
	185.615.000,00	
	11.785.707.100,00	
	2.624.138.700,00	
	17.300.000,00	
	116.838.700,00	
	2.490.000.000,00	
	2.674.235.700,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	36.550.000,00	
	35.185.700,00	
	2.602.500.000,00	
	6.487.332.700,00	
	51.350.000,00	
	90.302.700,00	
	6.345.680.000,00	
	528.383.000,00	
	528.383.000,00	
	22.050.000,00	
	6.333.000,00	
	500.000.000,00	
	3.099.989.100,00	
	2.656.950.100,00	
	4.250.000,00	
	5.087.500,00	
	2.647.612.600,00	
	443.039.000,00	
	443.039.000,00	
	2.547.275.800,00	
	627.499.600,00	
	24.100.000,00	
	21.424.600,00	
	581.975.000,00	
	1.919.776.200,00	
	17.160.000,00	
	69.906.200,00	
	1.832.710.000,00	
	974.370.700,00	
	974.370.700,00	
	12.950.000,00	
	11.420.700,00	
	950.000.000,00	
	3.375.799.200,00	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09	<i>Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01	<i>Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan</i>
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04	<i>Pengadaan alat-alat berat</i>
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat</i>
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 24	Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15	<i>Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun</i>
1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18	<i>Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)</i>
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02	<i>Pembangunan/peningkatan infrastruktur</i>
1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02	<i>Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan</i>
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03	<i>Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan</i>
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11	<i>Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)</i>
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By Simfidi

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	1.555.313.400,00	
	13.050.000,00	
	62.262.900,00	
	1.480.000.500,00	
	794.962.900,00	
	12.550.000,00	
	60.152.900,00	
	722.260.000,00	
	1.025.522.900,00	
	12.550.000,00	
	60.152.900,00	
	952.820.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(33.877.902.120,00)	

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI



REMIGO YOLANDO BERUTU

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
LANJAU DAN PEMBIAYAAN
 N ANGGARAN 2011

	Jumlah	Dasar Hukum	
		3	4
	500.000,00		
	500.000,00		
	500.000,00		
	5.580.081.798,00		
	2.150.687.198,00		
	2.150.687.198,00		
	3.429.394.600,00		
	732.957.500,00		
	3.000.000,00		
	3.000.000,00		
Operasional	53.600.000,00		
	53.600.000,00		
	64.470.000,00		
	64.470.000,00		
	54.570.000,00		
	54.570.000,00		
	32.654.000,00		
	32.654.000,00		
	4.029.300,00		
	4.029.300,00		
Mentor	58.399.200,00		
	58.399.200,00		
	7.540.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 1.06
Organisasi : 1.06.01
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.06.1.06.01.00.00.4	PENDAPATAN
1.06.1.06.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.06.1.06.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah
1.06.1.06.01.00.00.5	BELANJA
1.06.1.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai
1.06.1.06.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.06.1.06.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perk</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 01 . 25	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	<i>Peneliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15	<i>Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat</i>
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kejasama Pembangunan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06	<i>Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsen</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07	<i>Fasilitasi/koordinasi program pengembangan kawasan agro kota</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08	<i>Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan (PPDT)</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	<i>Rencana detail pengembangan kawasan agroforestry</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11	<i>Rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPD)</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
otoran	5.580.000,00	
	1.560.000,00	
	47.200.000,00	
	47.200.000,00	
	57.600.000,00	
	57.600.000,00	
	349.895.000,00	
	349.895.000,00	
	107.600.000,00	
	70.000.000,00	
	70.000.000,00	
	37.600.000,00	
	37.600.000,00	
	207.750.000,00	
	207.750.000,00	
	152.430.000,00	
trasi	55.320.000,00	
	468.940.900,00	
	52.657.000,00	
	16.775.000,00	
politan/forum kabupaten /	35.882.000,00	
	68.623.200,00	
	22.010.000,00	
	46.613.200,00	
nan daerah tertinggal	70.225.600,00	
	29.695.000,00	
	40.530.600,00	
	153.062.100,00	
	133.145.000,00	
	19.917.100,00	
	124.373.000,00	
	101.975.000,00	
4)	22.398.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
pembangunan	266.235.000,00	

	266.235.000,00	

	266.235.000,00	

	636.766.850,00	

	67.926.500,00	

an (LKPJ)	31.775.000,00	

	36.151.500,00	

	59.373.200,00	

	28.555.000,00	

	30.818.200,00	

(PPAS)	57.834.100,00	

	21.290.000,00	

	36.544.100,00	

	57.402.750,00	

	22.505.000,00	

Anggaran Sementara	34.897.750,00	

	207.463.500,00	

	53.225.000,00	

	154.238.500,00	

	46.841.500,00	

	20.166.000,00	

	26.675.500,00	

	95.606.000,00	

	33.075.000,00	

	62.531.000,00	

aten Pakpak Bharat	44.319.300,00	

	40.995.000,00	

	3.324.300,00	

	424.512.700,00	

	123.212.100,00	

asyarakat	103.195.000,00	

	20.017.100,00	

	170.088.500,00	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.06 . 1.06.01 . 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01	<i>Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan</i>
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	<i>Penyusunan rancangan RKPD</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12	<i>Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14	<i>Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15	<i>Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon (PPAS)</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20	<i>Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29	<i>Pelaksanaan musrenbang forum SKPD</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 34	<i>Penetapan dan sosialisasi RPJM Kabupaten Pakpak Bharat</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35	<i>Fasilitasi penyusunan RKA SKPD</i>
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19	<i>Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten</i>
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.06 . 1.06.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.06.01 . 22 . 20	<i>Identifikasi dampak bantuan pemerintah terhadap pendapatan</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.06 . 1.06.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Prospek pengembangan UMKM di Kabupaten Pakpak Bharat</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program perencanaan sosial dan budaya <i>Penyusunan strategi pembangunan daerah melalui pende</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber <i>Penyusunan rencana jalan lingkar (ring road) kota Salak</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Fasilitasi dan koordinasi rencana tata ruang tingkat kabupa</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RT</i> <i>Bharat</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	124.762.000,00	
	45.326.500,00	
	131.212.100,00	
	112.195.000,00	
	19.017.100,00	
	135.163.400,00	
	136.163.400,00	
	113.425.000,00	
	22.738.400,00	
	448.468.250,00	
	193.245.000,00	
	179.060.000,00	
	14.185.000,00	
	175.265.250,00	
	89.120.000,00	
	86.145.250,00	
	79.958.000,00	
	12.424.000,00	
	31.534.000,00	
	36.000.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(5.579.581.798,00)	

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI

REMIGO YOLANDO BERUTU



Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**UPATEN PAKPAK BHARAT
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
ANJA DAN PEMBIAYAAN**

ANGGARAN 2011

JUMLAH		DASAR HUKUM
3	4	
95.000.000,00	Perda No. 13 Tahun 2008	
95.000.000,00		
95.000.000,00		
2.622.530.421,00		
1.343.772.246,00		
1.343.772.246,00		
1.278.758.175,00		
755.069.950,00		
47.074.100,00		
47.074.100,00		
32.400.000,00		
32.400.000,00		
6.694.600,00		
6.694.600,00		
45.646.600,00		
45.646.600,00		
2.391.250,00		
2.391.250,00		
104.913.400,00		
850.000,00		
321.700,00		
103.741.700,00		
5.240.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PENDAPATAN, BELANJA, DAN TRANSFER

Urusan Pemerintahan : 1.10		Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1.10.01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 1.10.01.01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE REKENING	URAIAN	
1	2	
1.10.1.10.01.00.00.4	PENDAPATAN	
1.10.1.10.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1.10.1.10.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	
1.10.1.10.01.00.00.5	BELANJA	
1.10.1.10.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	
1.10.1.10.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	
1.10.1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.10.1.10.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	
1.10.1.10.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.10.1.10.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.10.1.10.01.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	
1.10.1.10.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.10.1.10.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.10.1.10.01.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan umum</i>	
1.10.1.10.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.10.1.10.01.01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	
1.10.1.10.01.01.13.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.10.1.10.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.10.1.10.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	
1.10.1.10.01.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.01.15.5.2.3	Belanja Modal
1.10.1.10.01.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.10.1.10.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.01.22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perk</i>
1.10.1.10.01.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.01.27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.10.1.10.01.01.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10.1.10.01.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.10.1.10.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.02.30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>
1.10.1.10.01.02.30.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.02.45	<i>Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor</i>
1.10.1.10.01.02.45.5.2.1	Belanja Pegawai
1.10.1.10.01.02.45.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.02.45.5.2.3	Belanja Modal
1.10.1.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.10.1.10.01.05.01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.10.1.10.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.05.02	<i>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</i>
1.10.1.10.01.05.02.5.2.1	Belanja Pegawai
1.10.1.10.01.05.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.1.10.01.15.14	<i>Pencetakan registrasi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Kuitip</i>
1.10.1.10.01.15.14.5.2.1	Belanja Pegawai
1.10.1.10.01.15.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.15.16	<i>Pelatihan tenaga petugas register</i>
1.10.1.10.01.15.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.10.1.10.01.15.19	<i>Pengadaan papan billboard</i>

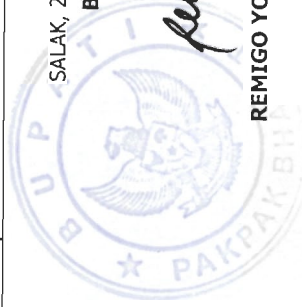
	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	3.240.000,00	
	2.000.000,00	
	24.600.000,00	
	24.600.000,00	
	318.650.000,00	
	318.650.000,00	
	157.200.000,00	
	157.200.000,00	
	10.260.000,00	
	10.260.000,00	
	136.806.925,00	
	16.003.975,00	
	16.003.975,00	
	48.010.000,00	
	48.010.000,00	
	20.500.000,00	
	20.500.000,00	
	52.292.950,00	
	850.000,00	
	48.942.950,00	
	2.500.000,00	
	219.480.000,00	
	183.170.000,00	
	183.170.000,00	
	36.310.000,00	
	5.100.000,00	
	31.210.000,00	
	167.401.300,00	
	57.450.000,00	
	450.000,00	
	57.000.000,00	
	10.396.000,00	
	10.396.000,00	
	30.017.000,00	

antoran

ur

an Akta Catatan Sipil

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	850.000,00	
	2.167.000,00	
	27.000.000,00	
	45.005.900,00	
	45.005.900,00	
	24.532.400,00	
	400.000,00	
	24.132.400,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.527.530.421,00)	



SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI

Remigo Yolando Berutu

REMIGO YOLANDO BERUTU

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Pelayanan KTP, KK berjalan</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Sosialisasi akte kelahiran</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

Lampiran III Peraturan Daerah

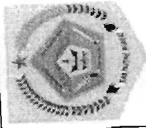
Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
ANJA DAN PEMBIAYAAN

ANGGARAN 2011

Jumlah		Dasar Hukum
3	4	
3.227.598.725,00		
1.687.870.235,00		
1.687.870.235,00		
1.539.728.490,00		
550.273.110,00		
21.000.000,00		
21.000.000,00		
7.645.300,00		
7.645.300,00		
42.365.480,00		
42.365.480,00		
19.662.120,00		
19.662.120,00		
31.724.650,00		
700.000,00		
105.000,00		
30.919.650,00		
4.600.000,00		
3.600.000,00		
1.000.000,00		
29.792.000,00		
29.792.000,00		
32.400.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PENDAPATAN, BELANJA**
TAHUN

Urusan Pemerintahan : 1.13 Organisasi : 1.13.01 Sub Unit Organisasi : 1.13.01.01		Urusan Wajib Sosial DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KODE REKENING	URAIAN	
1	2	
1.13.1.13.01.00.00.5	BELANJA	
1.13.1.13.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	
1.13.1.13.01.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	
1.13.1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.13.1.13.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
1.13.1.13.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13.1.13.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
1.13.1.13.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13.1.13.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	
1.13.1.13.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13.1.13.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	
1.13.1.13.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13.1.13.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.1	Belanja Pegawai	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13.1.13.01.01.13.5.2.3	Belanja Modal	
1.13.1.13.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13.1.13.01.01.15.5.2.3	Belanja Modal	
1.13.1.13.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	
1.13.1.13.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13.1.13.01.01.22	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By Simba

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.13. 1.13.01. 01. 22. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13. 1.13.01. 01. 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.13. 1.13.01. 01. 26. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13. 1.13.01. 01. 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD</i>
1.13 1.13.01. 01. 27. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.13. 1.13.01. 01. 27. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13. 1.13.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.13 1.13.01. 02. 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>
1.13. 1.13.01. 02. 07. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.13. 1.13.01. 02. 07. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13. 1.13.01. 02. 07. 5. 2. 3	Belanja Modal
1.13. 1.13.01. 02. 10	<i>Pengadaan mebelair</i>
1.13. 1.13.01. 02. 10. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.13. 1.13.01. 02. 10. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13. 1.13.01. 02. 10. 5. 2. 3	Belanja Modal
1.13. 1.13.01. 02. 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.13. 1.13.01. 02. 24. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13. 1.13.01. 02. 30	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>
1.13. 1.13.01. 02. 30. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13. 1.13.01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.13. 1.13.01. 05. 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.13. 1.13.01. 05. 01. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
2.08. 1.13.01. 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi
2.08. 1.13.01. 15. 09	<i>Penyusunan profil dan data masyarakat transmigrasi di kabupaten</i>
2.08. 1.13.01. 15. 09. 5. 2. 1	<i>SP2 dan SP3 Sibaginder</i>
2.08. 1.13.01. 15. 09. 5. 2. 2	Belanja Pegawai
1.14. 1.13.01. 15	Belanja Barang dan Jasa
1.14. 1.13.01. 15. 01	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14. 1.13.01. 15. 01. 5. 2. 1	<i>Penyusunan data base tenaga kerja daerah</i>
1.14. 1.13.01. 15. 01. 5. 2. 2	Belanja Pegawai
1.14. 1.13.01. 15. 01. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.13. 1.13.01. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.13. 1.13.01. 16. 16	<i>Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat</i>
1.13. 1.13.01. 16. 16. 5. 2. 1	Belanja Pegawai

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBAYARAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	32.400.000,00	
	345.305.000,00	
	345.305.000,00	
	15.778.560,00	
	8.080.000,00	
	7.698.560,00	
	100.147.580,00	
	26.201.580,00	
	800.000,00	
	401.580,00	
	25.000.000,00	
	21.046.000,00	
	700.000,00	
	240.000,00	
	20.106.000,00	
	45.900.000,00	
	45.900.000,00	
	7.000.000,00	
	7.000.000,00	
	155.890.000,00	
	155.890.000,00	
	155.890.000,00	
	48.555.600,00	
	48.555.600,00	
	1.600.000,00	
	46.955.600,00	
	47.834.600,00	
	47.834.600,00	
	8.800.000,00	
	39.034.600,00	
	280.707.100,00	
	34.200.000,00	
	850.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	33.350.000,00	
	175.307.100,00	
	1.750.000,00	
	173.557.100,00	
	49.200.000,00	
	4.210.000,00	
	44.990.000,00	
	22.000.000,00	
	11.600.000,00	
	10.400.000,00	
	117.046.700,00	
	117.046.700,00	
	2.320.300,00	
	114.726.700,00	
	41.160.000,00	
	41.100.000,00	
	1.270.000,00	
	39.830.000,00	
	198.173.800,00	
	39.200.000,00	
	850.000,00	
	38.350.000,00	
	99.747.200,00	
	99.747.200,00	
	42.426.600,00	
	9.120.000,00	
	33.306.600,00	
	8.000.000,00	
	400.000,00	
	7.600.000,00	
	8.800.000,00	
	400.000,00	
	8.400.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(3.227.598.725,00)	

URAIAN

2

KODE
REKENING

1

1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah tidak layak
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17	Belanja Pegawai	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2		Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18		
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	Penyuluhan tentang NAPZA terhadap anak remaja
1.13 . 1.13.01 . 16 . 19		
1.13 . 1.13.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
2.08 . 1.13.01 . 16		Program transmigrasi lokal
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05		Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan tr
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	Sibagindar
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13 . 1.13.01 . 19		Program pembinaan panti asuhan / panti jompo
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07		pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi lansia potens
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13 . 1.13.01 . 21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosi
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10		Peringatan Hari Pahlawan
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 13		Operasional laruna siaga bencana dan TKS
1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)
1.13 . 1.13.01 . 21 . 14		
1.13 . 1.13.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 15		Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional
1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16		Peringatan Hari Lansia
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By SimIda

KODE REKENING	URAIAN
1	2

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By Simba

JUMLAH	DASAR HUKUM
3	4

SALAK, 25 Januari 2011
BUPATI



REMIGO YOLANDO BERUTU

**UPATEN PAKPAK BHARAT
 PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 ANJA DAN PEMBIAYAAN**

ANGGARAN 2011

UDAL
 UDAL

JUMLAH:		DASAR HUKUM
3	4	
58.462.500,00	Perda No. 17 Tahun 2006 Perda No. 8 Tahun 2009 Perda No. 14 Tahun 2006 Perda No. 12 Tahun 2006 Perda No. 20 Tahun 2007 Perda No. 19 Tahun 2007	
58.462.500,00		
58.462.500,00		
1.574.639.607,00		
872.077.907,00		
872.077.907,00		
702.561.700,00		
402.684.100,00		
23.392.000,00		
23.392.000,00		
25.905.300,00		
25.905.300,00		
66.202.200,00	antor	
66.202.200,00		
2.283.600,00		
2.283.600,00		
8.793.000,00		
8.793.000,00		
5.580.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PENDAPATAN, BELANJA**
TAHUN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.16
Organisasi : 1.16.01
Sub Unit Organisasi : 1.16.01.01

Urusan Wajib Penanaman Modal
KANTOR PELAYANAN PERJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MO
KANTOR PELAYANAN PERJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MO

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.16.1.16.01.00.00.4 1.16.1.16.01.00.00.4.1 1.16.1.16.01.00.00.4.1.2	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah
1.16.1.16.01.00.00.5 1.16.1.16.01.00.00.5.1 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1 1.16.1.16.01.01.02.5.2 1.16.1.16.01.01 1.16.1.16.01.01.02 1.16.1.16.01.01.02.5.2.2 1.16.1.16.01.01.10 1.16.1.16.01.01.10.5.2.2 1.16.1.16.01.01.11 1.16.1.16.01.01.11.5.2.2 1.16.1.16.01.01.12 1.16.1.16.01.01.12.5.2.2 1.16.1.16.01.01.14 1.16.1.16.01.01.14.5.2.2 1.16.1.16.01.01.15	BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa Penyediaan alat tulis kantor Belanja Barang dan Jasa Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ka Belanja Barang dan Jasa Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.16.1.16.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.15.5.2.3	Belanja Modal
1.16.1.16.01.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.16.1.16.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>
1.16.1.16.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perk.</i>
1.16.1.16.01.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.01.27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.16.1.16.01.01.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.16.1.16.01.02.05	<i>pengadaan kendaraan dinas/operasional</i>
1.16.1.16.01.02.05.5.2.3	Belanja Modal
1.16.1.16.01.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.16.1.16.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>
1.16.1.16.01.02.28.5.2.3	Belanja Modal
1.16.1.16.01.02.30.5.2.2	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</i>
1.16.1.16.01.05	Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.05.01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.16.1.16.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.16.1.16.01.16.19	<i>Pembuatan dan revisi PERDA perzinan</i>
1.16.1.16.01.16.19.5.2.1	Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.16.1.16.01.16.20	<i>Sosialisasi pelayanan kegiatan perzinan</i>
1.16.1.16.01.16.20.5.2.1	Belanja Pegawai
1.16.1.16.01.16.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	4.680.000,00	
	900.000,00	
	10.048.000,00	
	10.048.000,00	
	203.850.000,00	
	203.850.000,00	
	32.400.000,00	
	32.400.000,00	
	24.230.000,00	
	24.230.000,00	
	24.230.000,00	
	133.036.500,00	
	33.000.000,00	
	33.000.000,00	
	51.020.000,00	
	51.020.000,00	
	44.766.500,00	
	44.766.500,00	
	4.250.000,00	
	4.250.000,00	
	115.070.000,00	
	115.070.000,00	
	115.070.000,00	
	51.771.100,00	
	8.827.800,00	
	3.115.000,00	
	5.712.800,00	
	42.943.300,00	
	1.950.000,00	
	40.993.300,00	
	(1.516.177.107,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)		

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	850.000,00	
	2.167.000,00	
	27.000.000,00	
	45.005.900,00	
	45.005.900,00	
	24.532.400,00	
	400.000,00	
	24.132.400,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.527.530.421,00)	


 SALAK, 25 Januari 2011
BUPATI

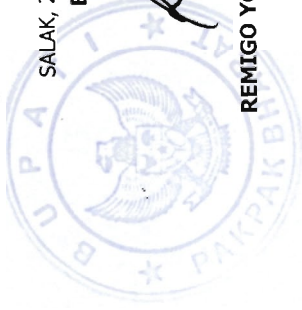
REMIGO YOLANDO BERUTU

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22	<i>Pelayanan KTP, KK berjalan</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23	<i>Sosialisasi akte kelahiran</i>
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.10 . 1.10.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI



Remigo Yolando Berutu

REMIGO YOLANDO BERUTU

KODE REKENING	URAIAN
1	2

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**UPATEN PAKPAK BHARAT
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
ANJA DAN PEMBIAYAAN**

ANGGARAN 2011

DAN KEBERSIHAN
DAN KEBERSIHAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	56.336.000,00	Perda No. 18 Tahun 2007 Perda No. 16 Tahun 2006
	56.336.000,00	
	56.336.000,00	
	5.118.990.704,00	
	1.760.770.133,00	
	1.760.770.133,00	
	3.358.220.571,00	
	1.090.994.200,00	
	1.350.000,00	
	1.350.000,00	
Operasional	29.100.000,00	
	29.100.000,00	
	220.340.000,00	
	220.340.000,00	
	3.305.800,00	
	3.305.800,00	
	8.500.000,00	
	8.500.000,00	
	35.221.600,00	
	35.221.600,00	
Antor	27.160.200,00	
	27.160.200,00	
	2.444.100,00	



PEMERINTAH KABUPATEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PENDAPATAN, BELANJA
TAHUN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.17 Organisasi : 1.17.01 Sub Unit Organisasi : 1.17.01.01		Urusan Wajib Kebudayaan DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTANAMAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTANAMAN
KODE REKENING	URAIAN	
1	2	
1.17.1.17.01.00.00.4	PENDAPATAN	
1.17.1.17.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	
1.17.1.17.01.00.00.5	BELANJA	
1.17.1.17.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	
1.17.1.17.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	
1.17.1.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.17.1.17.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	
1.17.1.17.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.17.1.17.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.17.1.17.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/lo	
1.17.1.17.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.17.1.17.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.17.1.17.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
1.17.1.17.01.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.17.1.17.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.17.1.17.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	
1.17.1.17.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan k	

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.17 . 1.17.01 .01 . 12 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 .01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>
1.17 . 1.17.01 .01 . 13 .5 .2 .3	Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 .01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>
1.17 . 1.17.01 .01 . 15 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 .01 . 15 .5 .2 .3	Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 .01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.17 . 1.17.01 .01 . 17 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 .01 . 22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perk</i>
1.17 . 1.17.01 .01 . 22 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 .01 . 26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.17 . 1.17.01 .01 . 26 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 .01 . 27	<i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD</i>
1.17 . 1.17.01 .01 . 27 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.17 . 1.17.01 .02 .22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.17 . 1.17.01 .02 .22 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 .02 .33	<i>Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman</i>
1.17 . 1.17.01 .02 .33 .5 .2 .1	Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 .02 .33 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 .02 .33 .5 .2 .3	Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.17 . 1.17.01 .05 .01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.17 . 1.17.01 .05 .01 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.17.01 .15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhu
1.07 . 1.17.01 .15 .12	<i>Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan</i>
1.07 . 1.17.01 .15 .12 .5 .2 .1	Belanja Pegawai
1.07 . 1.17.01 .15 .12 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.17.01 .15 .12 .5 .2 .3	Belanja Modal
1.08 . 1.17.01 .15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persami
1.08 . 1.17.01 .15 .04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarat</i>
1.08 . 1.17.01 .15 .04 .5 .2 .1	Belanja Pegawai
1.08 . 1.17.01 .15 .04 .5 .2 .2	Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 1.17.01 .15 .07	<i>Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
Jumlah	2.444.100,00	
	25.963.000,00	
	25.963.000,00	
	15.060.000,00	
	9.360.000,00	
	5.700.000,00	
	30.468.000,00	
	30.468.000,00	
	334.800.000,00	
	334.800.000,00	
Jumlah Kantor	348.720.000,00	
	348.720.000,00	
	8.561.500,00	
	8.561.500,00	
	55.471.810,00	
	5.184.250,00	
	5.184.250,00	
	50.287.560,00	
	1.250.000,00	
	3.110.170,00	
Jumlah Anggaran	45.927.390,00	
	207.437.500,00	
	207.437.500,00	
	207.437.500,00	
	196.198.631,00	
	2.975.000,00	
	8.973.600,00	
	184.250.031,00	
	72.235.250,00	
	50.375.550,00	
Jumlah Persampahan	1.700.000,00	
	48.675.550,00	
	21.859.700,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
negeri	21.859.700,00	
	66.305.900,00	
	66.305.900,00	
	13.850.000,00	
	52.455.900,00	
	56.749.020,00	
	56.749.020,00	
	11.700.000,00	
	45.049.020,00	
	237.857.100,00	
h purbakala, museum	128.350.600,00	
	1.850.000,00	
	6.500.600,00	
	120.000.000,00	
	34.531.900,00	
	1.900.000,00	
	4.631.900,00	
	28.000.000,00	
	74.974.600,00	
	74.974.600,00	
	163.930.170,00	
	163.930.170,00	
	3.575.000,00	
	23.355.170,00	
	137.000.000,00	
	1.039.636.200,00	
	898.498.100,00	
	71.925.000,00	
	776.573.100,00	
	50.000.000,00	
	100.157.400,00	
	5.075.000,00	
	95.082.400,00	
	40.980.700,00	
		Halaman 3

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.08 . 1.17.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 15 1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 1.17 . 1.17.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 2.04 . 1.17.01 . 15 2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 2.04 . 1.17.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 16 1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 2.04 . 1.17.01 . 16 2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 2.04 . 1.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 1.17 . 1.17.01 . 17 1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.17 . 1.17.01 . 17 . 06	Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Nilai Budaya <i>Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan pemasaran pariwisata <i>Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pengelolaan Kekayaan Budaya <i>Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah dan peninggalan bawah air</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Pengelolaan karya cetak dan karya rekam</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Pendukung promosi budaya pakpak</i> Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan destinasi pariwisata <i>Pengembangan daerah tujuan wisata</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Program Pengelolaan Keragaman Budaya <i>Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By Simba

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.17.1.17.01.17.06.5.2.1	Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.17.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.17.01.21	Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi
1.07.1.17.01.21.05	<i>Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru</i>
1.07.1.17.01.21.05	Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.17.01.21.05.5.2.2	<i>Sosialisasi nama jalan</i>
1.07.1.17.01.21.06	Belanja Pegawai
1.07.1.17.01.21.06.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa
1.07.1.17.01.21.06.5.2.2	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08.1.17.01.24	<i>Penataan RTH</i>
1.08.1.17.01.24.05	Belanja Pegawai
1.08.1.17.01.24.05.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.17.01.24.05.5.2.2	Belanja Modal
1.08.1.17.01.24.05.5.2.3	<i>Pengembangan taman rekreasi</i>
1.08.1.17.01.24.07	Belanja Pegawai
1.08.1.17.01.24.07.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa
1.08.1.17.01.24.07.5.2.2	Belanja Modal
1.08.1.17.01.24.07.5.2.3	

Jumlah	Jumlah	Dasar Hukum
3	3	4
	9.600.000,00	
	31.380.700,00	
	85.337.600,00	
	40.606.800,00	
	40.606.800,00	
	44.730.800,00	
	15.275.000,00	
	29.455.800,00	
	86.067.190,00	
	61.714.520,00	
	1.700.000,00	
	3.514.520,00	
	56.500.000,00	
	24.352.670,00	
	1.250.000,00	
	3.102.670,00	
	20.000.000,00	
	(5.062.654.704,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)		

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI



REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran III Peraturan Daerah

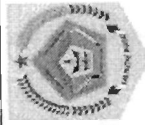
Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
JALAN DAN PEMBIAYAAN**

ANGGARAN 2011

		JUMLAH	DASAR HUKUM
		3	4
		1.588.656.022,00	
		966.021.458,00	
		966.021.458,00	
		622.634.564,00	
		321.652.680,00	
		24.202.880,00	
		400.000,00	
		23.802.880,00	
		14.100.000,00	
		14.100.000,00	
		47.699.100,00	
		850.000,00	
		4.000.000,00	
		42.849.100,00	
		2.948.000,00	
		2.948.000,00	
		6.104.000,00	
		6.104.000,00	
		2.091.000,00	
		2.091.000,00	
ntar		2.420.000,00	
		1.920.000,00	
		500.000,00	
		14.640.000,00	



PEMERINTAH KAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PENDAPATAN, BE
TAHU

Urusan Pemerintahan : 1.19	Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.19.01.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.19.1.19.01.00.00.5	BELANJA
1.19.1.19.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.01.01.5.2	RELANJA LANGSUNG
1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.1.19.01.01.01.5.2.1	Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.19.1.19.01.01.03.5.2.1	Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.03.5.2.3	Belanja Modal
1.19.1.19.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.1.19.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ka
1.19.1.19.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.15.5.2.3	Belanja Modal
1.19.1.19.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.22	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis per
1.19.1.19.01.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.27	Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD
1.19.1.19.01.01.27.5.2.1	Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.01.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.1.19.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.01.02.05.5.2.1	Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.02.05.5.2.3	Belanja Modal
1.19.1.19.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19.1.19.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal
1.19.1.19.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
1.19.1.19.01.22.06	Pelatihan penanggulangan bencana
1.19.1.19.01.22.06.5.2.1	Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.22.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.22.07	Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana
1.19.1.19.01.22.07.5.2.1	Belanja Pegawai
1.19.1.19.01.22.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.22.07.5.2.3	Belanja Modal

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
Kantoran	14.640.000,00	
	170.350.000,00	
	170.350.000,00	
	32.400.000,00	
	32.400.000,00	
	4.697.700,00	
	700.000,00	
	3.997.700,00	
	95.530.000,00	
	51.700.000,00	
Bantuan	1.700.000,00	
	50.000.000,00	
	43.830.000,00	
	43.830.000,00	
	26.075.000,00	
	26.075.000,00	
	26.075.000,00	
	26.075.000,00	
	179.376.884,00	
	68.454.600,00	
Bantuan alam	13.900.000,00	
	54.554.600,00	
	110.922.284,00	
	400.000,00	
	310.720,00	
	110.211.564,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(1.588.656.022,00)	

SALAK, 25 Januari 2011
 BUPATI



REMIGO YOLANDO BERUTU

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 DAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 STRUKTUR, FUNGSI, TUGAS DAN PEMBIAYAAN**

ANGGARAN 2011

	JUMLAH	DASAR HUKUM	
	3	4	
	2.227.205.638,00		
	1.164.697.638,00		
	1.164.697.638,00		
	1.062.508.000,00		
	317.340.800,00		
	8.700.000,00		
	8.700.000,00		
	49.260.000,00		
	49.260.000,00		
	7.250.000,00		
operasional	7.250.000,00		
	22.248.900,00		
	22.248.900,00		
	11.120.000,00		
	11.120.000,00		
	27.467.200,00		
	1.600.000,00		
	6.777.200,00		
	19.090.000,00		
	3.420.000,00		
kegiatan	3.420.000,00		
	26.928.000,00		
	26.928.000,00		
	37.461.100,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PENDAPATAN, BELANJA
TAHU

Urusan Pemerintahan : 1.19 Organisasi : 1.19.02 Sub Unit Organisasi : 1.19.02.01		Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
KODE REKENING	URAIAN		
1	2		
1.19.1.19.02.00.00.5	BELANJA		
1.19.1.19.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai		
1.19.1.19.02.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG		
1.19.1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.19.1.19.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		
1.19.1.19.02.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.19.1.19.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		
1.19.1.19.02.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.19.1.19.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		
1.19.1.19.02.01.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.19.1.19.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		
1.19.1.19.02.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.19.1.19.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan		
1.19.1.19.02.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.19.1.19.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		
1.19.1.19.02.01.13.5.2.1	Belanja Pegawai		
1.19.1.19.02.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.19.1.19.02.01.13.5.2.3	Belanja Modal		
1.19.1.19.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
1.19.1.19.02.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.19.1.19.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		
1.19.1.19.02.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
1.19.1.19.02.01.22	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran		

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.19. 1.19.02. 01. 22. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.19. 1.19.02. 01. 22. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.19.02. 01. 26	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah
1.19. 1.19.02. 01. 26. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.19.02. 01. 27	Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD
1.19. 1.19.02. 01. 27. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.19. 1.19.02. 01. 27. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.19.02. 03	Program peningkatan disiplin aparat
1.19. 1.19.02. 03. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19. 1.19.02. 03. 02. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.19. 1.19.02. 03. 02. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.19.02. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.19. 1.19.02. 05. 01	Pendidikan dan pelatihan formal
1.19. 1.19.02. 05. 01. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.19.02. 05. 06	Pelatihan SDM
1.19. 1.19.02. 05. 06. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.19. 1.19.02. 05. 06. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.19.02. 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan ling
1.19. 1.19.02. 15. 01	Penyediaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan
1.19. 1.19.02. 15. 01. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.19. 1.19.02. 15. 01. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.19.02. 16	Program pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan
1.19. 1.19.02. 16. 07	PAM Hari Besar
1.19. 1.19.02. 16. 07. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.19. 1.19.02. 16. 07. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.19.02. 16. 12	PAM kedatangan pejabat
1.19. 1.19.02. 16. 12. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.19. 1.19.02. 16. 12. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.19.02. 16. 13	Patrol pengawasan dan pengendalian PERDA
1.19. 1.19.02. 16. 13. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.19. 1.19.02. 16. 13. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	400.000,00	
	37.061.100,00	
	118.070.000,00	
	118.070.000,00	
	5.415.600,00	
	400.000,00	
	5.015.600,00	
	23.931.200,00	
	23.931.200,00	
	850.000,00	
	23.081.200,00	
	103.270.900,00	
	78.290.000,00	
	78.290.000,00	
	24.980.900,00	
	9.700.000,00	
	15.280.900,00	
	566.172.800,00	
	566.172.800,00	
	5.200.000,00	
	560.972.800,00	
	51.792.300,00	
	13.619.500,00	
	400.000,00	
	13.219.500,00	
	16.200.000,00	
	400.000,00	
	15.800.000,00	
	21.972.800,00	
	1.600.000,00	
	20.372.800,00	
	(2.227.205.638,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)		

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4



SALAK, 25 Januari 2011
BUPATI


REMIGO YOLANDO BERUTU

KODE REKENING	URAIAN
1	2

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**UPATEN PAKPAK BHARAT
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
ANJA DAN PEMBIAYAAN**

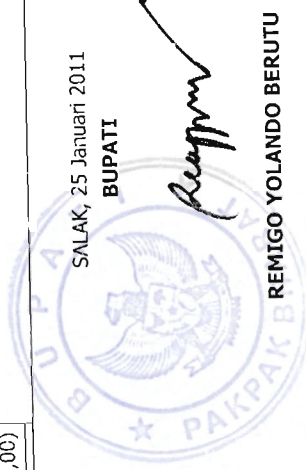
ANGGARAN 2011

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawajian dan Persandian

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	2.496.859.144,00	
	2.496.859.144,00	
	2.496.859.144,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(2.496.859.144,00)	

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI



REMIGO YOLANDO BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PENDAPATAN, BELANJA
TAHUN 2010

Urusan Wajib Otentisasi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

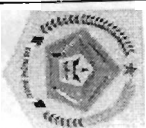
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 1.20

Organisasi : 1.20.01

Sub Unit Organisasi : 1.20.01.01

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.20.1.20.01.00.00.5	BELANJA
1.20.1.20.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai



**PEMERINTAH KOTA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN
PENDAPATAN, BELANJA
TA 2012**

Urusan Pemerintahan	: 1. 20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Organisasi	: 1. 20. 02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 1. 20. 02. 01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KODE REKENING	URAIAN	
1	2	
1.20.1.20.02.00.00.5	BELANJA	
1.20.1.20.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III Peraturan Daerah
Nomor : 1 Tahun 2011
Tanggal : 25 Januari 2011

KABUPATEN PAKPAK BHARAT
AN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
BUN ANGGARAN 2011

isi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	287.467.506,00	
	287.467.506,00	
	287.467.506,00	
SURPLUS / (DEFISIT)	(287.467.506,00)	

SALAK, 25 Januari 2011

BUPATI



REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 1 Tahun 2011

Tanggal : 25 Januari 2011

**BUPATEN PAKPAK BHARAT
N PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
LANJA DAN PEMBIAYAAN**

N ANGGARAN 2011

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

JUMLAH		DASAR HUKUM
3	4	
348.230.000,00	Perda No. 16 Tahun 2006	
348.230.000,00		
348.230.000,00		
34.974.067.273,00		
7.016.057.106,00		
7.016.057.106,00		
27.958.010.167,00		
10.551.993.300,00		
32.000.000,00		
32.000.000,00		
1.863.200.000,00		
1.863.200.000,00		
232.544.400,00		
232.544.400,00		
204.906.600,00		
4.350.000,00		
200.556.600,00		
191.614.800,00		
4.350.000,00		
187.264.800,00		
1.361.988.500,00		
4.750.000,00		
583.236.000,00		
774.002.500,00		



RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.20.1.20.03.01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undan</i>
1.20.1.20.03.01.15.5.2.1	Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.15.5.2.3	Belanja Modal
1.20.1.20.03.01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.22	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perf</i>
1.20.1.20.03.01.22.5.2.1	Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.01.26	<i>Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah</i>
1.20.1.20.03.01.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03.02.05	<i>pengadaan kendaraan dinas/operasional</i>
1.20.1.20.03.02.05.5.2.1	Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.05.5.2.3	Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.08	<i>Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas</i>
1.20.1.20.03.02.08.5.2.1	Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.08.5.2.3	Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.10	<i>Pengadaan mebeleur</i>
1.20.1.20.03.02.10.5.2.1	Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.10.5.2.3	Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.14	<i>Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah</i>
1.20.1.20.03.02.14.5.2.1	Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.14.5.2.3	Belanja Modal
1.20.1.20.03.02.21	<i>Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas</i>
1.20.1.20.03.02.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
1.20.1.20.03.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>

	Jumlah	Dasar Hukum
	3	4
gan	34.445.000,00	
	800.000,00	
	5.895.000,00	
	27.750.000,00	
	2.110.328.000,00	
	2.110.328.000,00	
antoran	1.157.400.000,00	
	638.400.000,00	
	519.000.000,00	
	3.363.566.000,00	
	3.363.566.000,00	
	7.854.609.800,00	
	4.948.770.000,00	
	4.550.000,00	
	20.220.000,00	
	4.924.000.000,00	
	209.470.000,00	
	4.350.000,00	
	1.620.000,00	
	203.500.000,00	
	228.456.000,00	
	2.950.000,00	
	3.000.000,00	
	222.506.000,00	
	453.603.800,00	
	168.850.000,00	
	249.911.400,00	
	34.842.400,00	
	235.200.000,00	
	235.200.000,00	
	165.000.000,00	
	165.000.000,00	
	1.512.350.000,00	
	1.512.350.000,00	
	101.760.000,00	

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
	101.760.000,00	
	258.470.000,00	
	258.470.000,00	
	4.750.000,00	
	253.720.000,00	
	1.555.203.000,00	
	1.448.640.000,00	
	1.448.640.000,00	
	47.058.000,00	
	12.825.000,00	
	34.233.000,00	
	59.505.000,00	
	4.075.000,00	
	55.430.000,00	
	655.927.800,00	
	65.694.800,00	
	23.820.000,00	
	41.874.800,00	
	36.105.200,00	
	6.070.000,00	
	30.035.200,00	
	25.777.600,00	
	12.140.000,00	
	13.637.600,00	
	432.962.500,00	
	77.900.000,00	
	355.062.500,00	
	66.803.100,00	
	21.100.000,00	
	45.703.100,00	
	28.584.600,00	
	10.895.000,00	
	17.689.600,00	
	23.086.500,00	
Halaman 3		

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05 . 22	<i>Bimtek implementasi peraturan bupati tentang tata naskah dinas</i>
1.20 . 1.20.03 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 05 . 23	<i>Sosialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah</i>
1.20 . 1.20.03 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02	<i>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04	<i>Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05	<i>Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06	<i>Monitoring dan evaluasi harga sembako</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09	<i>Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)</i>
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.20.03 . 15	Program Pengembangan dan Keresahan Kebijakan Pemuda

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By SimId

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1.18. 1.20.03. 15. 08	<i>Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kemud</i>
1.18. 1.20.03. 15. 08. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.18. 1.20.03. 15. 08. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.25. 1.20.03. 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Me
1.25. 1.20.03. 15. 02	<i>Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Inf</i>
1.25. 1.20.03. 15. 02. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.25. 1.20.03. 15. 02. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.25. 1.20.03. 15. 02. 5. 2. 3	Belanja Modal
1.20. 1.20.03. 15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan ra
1.20. 1.20.03. 15. 01	<i>Pembahasan rancangan peraturan daerah</i>
1.20. 1.20.03. 15. 01. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.20. 1.20.03. 15. 01. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.24. 1.20.03. 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1.24. 1.20.03. 15. 02	<i>Pengumpulan data</i>
1.24. 1.20.03. 15. 02. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.24. 1.20.03. 15. 02. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.24. 1.20.03. 15. 02. 5. 2. 3	Belanja Modal
1.24. 1.20.03. 15. 03	<i>Pengklasifikasian data</i>
1.24. 1.20.03. 15. 03. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.24. 1.20.03. 15. 03. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.19. 1.20.03. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
1.19. 1.20.03. 16. 10	<i>Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat</i>
1.19. 1.20.03. 16. 10. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.19. 1.20.03. 16. 10. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.09. 1.20.03. 16	Program penataan penggunaan, pemilikan, penggunaan
1.09. 1.20.03. 16. 01	<i>Penataan penggunaan, pemilikan, penggunaan dan penan</i>
1.09. 1.20.03. 16. 01. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.09. 1.20.03. 16. 01. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.09. 1.20.03. 16. 01. 5. 2. 3	Belanja Modal
1.09. 1.20.03. 16. 03	<i>Sertifikasi tanah milik daerah</i>
1.09. 1.20.03. 16. 03. 5. 2. 1	Belanja Pegawai
1.09. 1.20.03. 16. 03. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa
1.20. 1.20.03. 16	Program peningkatan pelayanan kedinasaan kepala da
1.20. 1.20.03. 16. 01	<i>Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan</i>

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAJA DAN PEMBIAYAAN

	JUMLAH	DASAR HUKUM
	3	4
dia Massa ormasi	23.086.500,00	
	1.625.000,00	
	21.461.500,00	
	1.201.289.000,00	
	1.201.289.000,00	
kyat daerah	52.425.000,00	
	1.016.764.000,00	
	132.100.000,00	
	240.004.300,00	
	240.004.300,00	
n tindak kriminal	62.600.000,00	
	177.404.300,00	
	44.235.600,00	
	21.100.000,00	
	9.320.000,00	
an dan pemanfaatan tanah faatan tanah	1.180.000,00	
	10.600.000,00	
	23.135.600,00	
	9.440.000,00	
	13.695.600,00	
erah/wakil kepala daerah /anggota organisasi sosial	52.808.800,00	
	52.808.800,00	
	31.700.000,00	
	21.108.800,00	
	2.465.543.275,00	
	2.293.537.100,00	
	34.100.000,00	
	9.437.100,00	
	2.250.000.000,00	
	172.006.175,00	
	21.975.000,00	
	150.031.175,00	
	516.547.200,00	
	71.401.400,00	